BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Pemalang masih belum cukup baik, karena masih menghadapi berbagai kendala dari segi internal maupun eksternal organisasi yang menjadi faktor penghambat dalam pemeliharaan jalan. Pertama, Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pemeliharaan jalan belum dilaksanakan dengan produktif karena belum mampu menyerap anggaran sebesar 80% yang disebabkan oleh faktor sistem berupa lelang yang lama, mekanisme penganggaran yang dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa ketersediaan *cash flow* daerah, verifikasi berkas yang rumit, dan faktor eksternal berupa kurangnya tenaga Tim Lapangan UPJI di bawah naungan UPTD DPUPR Kabupaten Pemalang yang seharusnya bekerja sama dalam melakukan pemeliharaan rutin untuk menangani ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kedua, Bidang Bina Marga dalam memberikan kualitas layanan pemeliharaan jalan memang masih belum mampu dilakukan secara optimal karena pemeliharaan jalannya yang belum produktif dan terkendala faktor sistem berupa drainase yang masih buruk. Namun, kualitas layanannya yang berupa infrastruktur jalan yang sudah diberikan oleh Bidang Bina Marga juga masih menghadapi banyak tantangan dan hambatan dari faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh Bidang Bina Marga, berupa faktor curah hujan

yang tinggi, tanah yang labil, lalu lintas kendaraan bermuatan berat, dan *cash flow* daerah yang berperan besar dalam penentuan jenis pemeliharaan jalan. Ketiga, Bidang Bina Marga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pemeliharaan jalan sudah dilakukan dengan menyediakan akun media sosial Instagram yang dapat digunakan sebagai media pemberian aspirasi dan aduan. Sayangnya, respons Bidang Bina Marga terhadap aspirasi dan aduan yang diberikan oleh Masyarakat Kabupaten Pemalang masih belum cukup baik akibat dari faktor kepemimpinan dan faktor tim yang masih kurang berkomitmen dalam merespons aspirasi dan aduan masyarakat. Selain respons yang belum cukup baik, tindak lanjut terhadap aspirasi dan aduan yang diberikan oleh masyarakat juga belum mampu ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat karena terhambat oleh faktor sistem berupa kurangnya tenaga kerja Tim Lapangan UPJI di bawah naungan UPTD DPUPR Kabupaten Pemalang yang seharusnya bekerja sama dalam menindaklanjuti pemeliharaan jalan sementara atau darurat. Keempat, Bidang Bina Marga dalam memberikan pertanggungjawaban berupa transparansi terkait informasi pemeliharaan jalan belum dilakukan dengan cukup baik, karena pemberian informasi pemeliharaan jalan yan transparan hanya diberikan dengan maksimal kepada pemerintah daerah dan bukannya kepada masyarakat. Akuntabilitas yang masih belum cukup baik disebabkan karena faktor tim dan kepemimpinan yang masih belum terlalu mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemeliharaan jalan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pemberian informasi pemeliharaan jalan belum diberikan dengan maksimal

kepada Masyarakat Kabupaten Pemalang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kinerja Bidang Bina Marga yang secara keseluruhan masih belum baik disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor kepemimpinan, tim, sistem, dan kontekstual, khususnya faktor kontekstual berupa tekanan atau perubahan internal maupun eksternal yang sulit dikendalikan oleh Bidang Bina Marga. Faktor -faktor tersebut secara bersamaan saling mempengaruhi proses pemeliharaan jalan oleh Bidang Bina Marga, yang kemudian menghasilkan hasil akhir berupa infrastruktur jalan yang dapat digunakan oleh Masyarakat. Maka, diperlukan solusi-solusi untuk meminimalisir faktor-faktor yang sulit dikendalikan maupun faktor yang masih dapat dikendalikan untuk mendukung proses pemeliharaan jalan yang lebih baik dan maksimal di kemudian hari.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti berikan kepada Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, yaitu:

1. Bagi siapapun yang menjadi Bupati di Kabupaten Pemalang sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (APBD), hendaknya memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemeliharaan jalan agar mekanisme penganggaran dan ketersediaan *cash flow* yang dikelola oleh bendahara daerah dapat digunakan secara lebih banyak untuk kebutuhan pemeliharaan jalan. Hal ini penting dilakukan oleh seorang pemimpin kabupaten/kota agar unsur pengelola jalan kabupaten/kotanya dapat dengan maksimal melakukan

pemeliharaan jalan dan tidak terhambat oleh sumber daya anggaran yang terbatas.

2. Untuk meminimalisir faktor curah hujan yang tinggi, Bidang Bina Marga Kabupaten Pemalang hendaknya mengajukan pembangunan atau perbaikan sistem drainase kepada Bupati Kabupaten Pemalang agar tercipta infrastruktur jalan yang kondisinya bagus dan tidak mudah rusak. Untuk siapapun yang menjadi Bupati di Kabupaten Pemalang juga hendaknya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya pembangunan dan perbaikan drainase yang ada di Kabupaten emalang. Hal ini dikarenakan, sebanyak apapun pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh unsur pengelola jalannya, yaitu Bidang Bina Marga, jika drainase ruas-ruas jalannya masih buruk, tujuan pemeliharaan jalan untuk menghasilkan jalan dengan kondisi baik dan berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas tidak akan pernah tercapai.
3. Untuk meminimalisir curah hujan yang tinggi, kendaraan bermuatan berat, dan tanah yang labil, Bidang Bina Marga hendaknya berkoordinasi dan mengajukan penyediaan dana kepada Bupati Pemalang untuk melaksanakan pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin secara umum diisi dengan kegiatan pembersihan drainase dan penambalan lubang sementara/darurat. Sistem drainase yang sudah ada harus dirawat dengan baik melalui pemeliharaan rutin untuk membersihkan bagian-bagian drainasenya dari sampah maupun tanaman liar. Sementara pemeliharaan rutin berupa kegiatan

penambalan lubang dapat dilakukan guna meminimalisir kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berat dan tanah yang labil, agar kerusakannya tidak meluas dan menjadi lebih parah yang kemudian dapat menjadi beban biaya pemeliharaan jalan di kemudian hari.

4. Bidang Bina Marga hendaknya membentuk tim pengelola aspirasi dan aduan masyarakat dengan sungguh-sungguh untuk merespons segala aspirasi dan aduan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga Bidang Bina Marga dapat memberikan pemeliharaan jalan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.
5. Bidang Bina Marga dapat membuat *Hotline* aduan kondisi jalan agar Masyarakat Kabupaten Pemalang dapat melaporkan kondisi jalan terkini secara langsung kepada pihak-pihak tim internal Bidang Bina Marga.
6. Penyediaan media aspirasi dan aduan tidak akan terasa dampak nyatanya jika tidak ada tim yang menindaklanjuti aspirasi dan aduan tersebut, yaitu Tim Lapangan yang dapat menindaklanjuti aspirasi dan aduan tersebut secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, Bidang Bina Marga dapat mendiskusikan perekrutan pekerja harian lepas sebagai Tim Lapangan dengan Ketua DPUPR Kabupaten Pemalang maupun dengan Bupati Kabupaten Pemalang, dengan menekankan pentingnya keberadaan Tim Lapangan tersebut bagi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pemalang.

7. Ketua Bidang Bina Marga hendaknya secara berkala memantau publikasi-publikasi pemeliharaan jalan oleh Bidang Bina Marga di media sosial, agar segala materi publikasi yang seharusnya dipublikasikan tidak justru disimpan dan tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan publikasi media sosial memiliki peran yang penting bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, jika informasi terkait pemeliharaan jalannya tidak ada atau tidak dapat diakses oleh masyarakat secara bebas, Masyarakat Kabupaten Pemalang akan sulit untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemeliharaan jalan tersebut.